BAPPERIDA
KOTA TEGAL

RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH (BAPPERIDA) KOTA TEGAL





@bapperida_tegal
bapperidakotategal
bapperida.tegalkota.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat-Nya Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi (Bapperida) Daerah Kota Tegal Tahun 2025 - 2029 dapat diselesaikan dengan baik.

Dokumen Renstra Bapperida Kota Tegal disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029.

Melalui Rencana Strategis ditetapkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2025 - 2029. Dengan demikian, Rencana Strategis ini dapat menjadi acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bapperida Kota Tegal untuk 5 (lima) tahun kedepan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 - 2029 yang pada hakikatnya merupakan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan.

Demikian Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Tegal Tahun 2025 - 2029 disusun untuk dapat dilaksanakan secara akuntabel dan berorientasi pada peningkatan kinerja perencanaan pembangunan Kota Tegal.

Tegal, 9 September 2025

Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah Kota Tegal

SARTONO EKO SAPUTRO, S.STP
Pembina Utama Muda
NIP. 19760510 199602 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **I**

DAFTAR ISI ..... **II**

DAFTAR TABEL ..... **III**

DAFTAR GAMBAR ..... **IV**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan 4

1.3 Maksud dan Tujuan 7

1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS **9**

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 9

2.2 Sumber Daya 17

2.3 Kinerja Pelayanan 21

2.4 Kelompok Sasaran Layanan 37

2.5 Permasalahan Pelayanan 37

2.6 Isu Strategis 37

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN **40**

3.1 Tujuan dan Sasaran 40

3.2 Strategi 42

3.3 Arah Kebijakan 43

3.4 Penahapan 45

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN **46**

4.1 Cascading 46

4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan 71

4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) 99

BAB V PENUTUP **100**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sarana Prasarana Pendukung 20

Tabel 2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapperida Kota Tegal Tahun 2020 - 2024 23

Tabel 2.3 Data Hasil Riset Pemerintah Kota Tegal Tahun 2020 – 2024 24

Tabel 2.4 Data Inovasi Pemerintah Kota Tegal Tahun 2020 – 2024 25

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Tegal Tahun 2020 ... 26

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Tegal Tahun 2021 ... 26

Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bapperida Kota Tegal Tahun 2022 - 2024 29

Tabel 2.8 Pencapaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bapperida Kota Tegal Tahun 2020 - 2024 31

Tabel 2.9 Pencapaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) Tahun 2020 - 2024... 32

Tabel 2.10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Kota Tegal Tahun 2020 33

Tabel 2.11 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bapperida Kota Tegal Tahun 2021 – 2024..... 35

Tabel 2.12 Isu Strategis Bapperida Kota Tegal 38

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Bapperida Kota Tegal

Tahun 2025 - 2030 41

Tabel 3.2 Strategi Renstra Bapperida Kota Tegal Tahun 2025 - 2030 42

Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra Bapperida Kota Tegal

Tahun 2025 - 2030 44

Tabel 3.4 Penahapan Renstra Bapperida Kota Tegal

Tahun 2026 - 2030 45

Tabel 4.1 Cascading Bapperida Kota Tegal..... 47

Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Bapperida Kota Tegal Tahun 2025 - 2030..... 73

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapperida Kota Tegal Tahun 2025 - 2030 115

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 4
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bapperida Kota Tegal 16
Gambar 2.2 Komposisi Pegawai 17
Gambar 2.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 17
Gambar 2.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin 18
Gambar 2.5 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang 19

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan landasan utama dan pegangan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis, baik antar daerah, antar ruang antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan. Salah satu konsekuensi ditetapkannya Undang-undang tersebut adalah diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (7), yaitu "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun."

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, namun dalam penyusunan perencanaan daerah tetap harus memperhatikan keterkaitan antara perencanaan pemerintahan pusat, provinsi dan antar pemerintah daerah, sehingga pencapaian tujuan daerah mendukung pencapaian tujuan nasional. Aspek hubungan tersebut memperhatikan kewenangan yang diberikan terkait dengan hubungan sumber daya alam dan sumber daya lainnya maupun dengan pelayanan umum serta keuangan.

Penyusunan Renstra Bapperida Kota Tegal Tahun 2025 - 2029 selaras dengan RPJMD Kota Tegal Tahun 2025 – 2029, Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 dan Renstra Kementerian PPN/BAPPENAS RI Tahun 2025 - 2029. Renstra Bapperida Kota Tegal Tahun 2025 - 2029 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penyusunan renstra dilakukan dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, kesempatan, serta ancaman yang ada sehingga tujuan yang akan dicapai dapat mengantisipasi perkembangan masa depan sekaligus realistis sekaligus memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

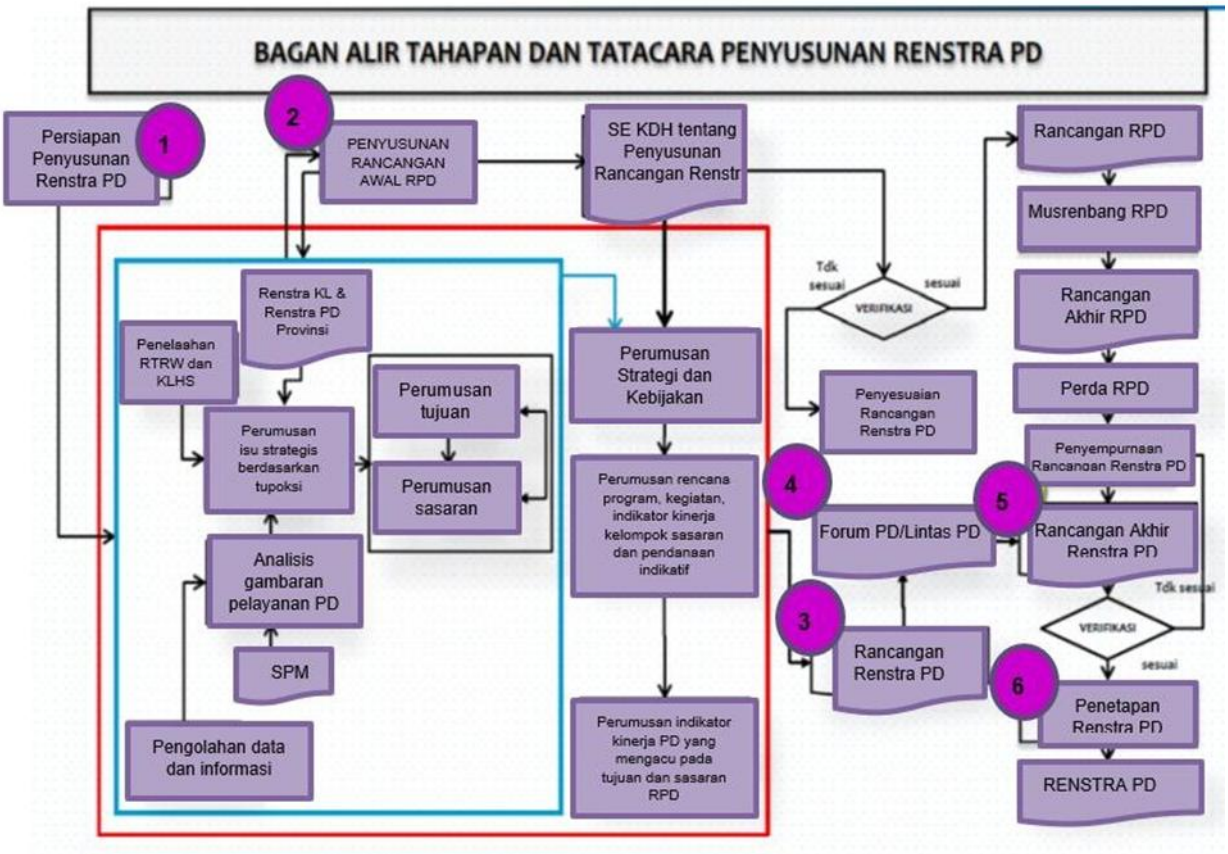
Perencanaan pembangunan sebagai proses manajemen maupun sebagai suatu kebijakan adalah merupakan tahapan awal dari proses pembangunan yang akan dilaksanakan. Perencanaan pembangunan sangat penting dalam menentukan arah pembangunan daerah karena didalamnya terkandung visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai serta pilihan cara-cara untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Pembangunan dapat dimaknai sebagai upaya sadar untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki, memecahkan permasalahan yang dihadapi serta memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat menuju keadaan atau kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Perencanaan pembangunan jangka menengah diperlukan sebagai pedoman bagi pelaksanaan pembangunan tahunan yang saling berkaitan dan berkesinambungan. Perencanaan Pembangunan Daerah itu sendiri pada prinsipnya merupakan kegiatan mensinergikan berbagai kepentingan dari stakeholder atau pelaku pembangunan daerah yang dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) domain yaitu state atau lembaga pemerintahan yang terdiri dari eksekutif dan legislatif

daerah, private atau swasta yaitu pelaku-pelaku dunia usaha, dan society atau masyarakat.

Renstra Perangkat Daerah merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra Perangkat Daerah yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dokumen perencanaan dengan dokumen yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya. Di samping itu, keterkaitan yang jelas antara kebijakan yang terdapat dalam dokumen-dokumen perencanaan dan alokasi anggaran yang dikelola oleh suatu perangkat daerah (sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya) juga harus diatur agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di daerah. Dokumen perencanaan tersebut meliputi Rencana Strategis , Rencana Kerja dan Rencana Kegiatan dan Anggaran.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Sumber Data : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, 2025

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Tegal adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal;
13. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Tegal

Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 12);

14. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2025 - 2029;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD Dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
20. Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 30 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Bapperida Kota Tegal adalah :

1. Sebagai penjabaran atas RPJMD Kota Tegal Tahun 2025 - 2029 yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Bapperida Kota Tegal;
2. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Bapperida Kota Tegal dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan;

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Bapperida Kota Tegal adalah:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi Bapperida Kota Tegal dalam melaksanakan penyusunan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun;
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun 5 (lima) tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Bapperida Kota Tegal Tahun 2025 - 2029 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat mengenai Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Kelompok Sasaran Layanan Mitra Perangkat Daerah, Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah dan Isu Strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat tentang Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target Indikator Kinerja, Pagu Indikatif, Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran melalui indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BAPPERIDA KOTA TEGAL

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) merupakan pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perencanaan, bidang Penelitian dan Pengembangan seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Walikota Tegal Nomor 78 Tahun 2023 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi adalah sebagai berikut :

2.1.1 Tugas Pokok :

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian pengembangan pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi secara menyeluruh dan berkelanjutan dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2.1.2 Fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan, dan bidang Penelitian dan Pengembangan serta invensi dan inovasi yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi

b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan, dan bidang Penelitian dan Pengembangan
c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, dan bidang riset dan inovasi Daerah;
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan, dan bidang Penelitian dan Pengembangan;
e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan, dan bidang Penelitian dan Pengembangan;
f. Pengendalian administrasi kesekretariatan Badan;
g. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTB; dan
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), terdiri dari :

2.1.3.1 Kepala Badan;

Mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan

2.1.3.2 Sekretariat :

Merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Sekretariat bertugas melaksanakan koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

pemantauan, evaluasi dan pelaporan dilingkup perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian, serta pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan.

Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan evaluasi di lingkup badan;
b. Penyusunan kebijakan, koordinasi, dan monitoring evaluasi di bidang keuangan pelaksanaan lingkup badan; dan
c. Penyusunan kebijakan, koordinasi, dan monitoring evaluasi di bidang umum dan kepegawaian lingkup badan.

Susunan organisasi Sekretariat, terdiri atas :

a. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
b. Subbagian Keuangan; dan
c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

masing-masing Kepala Subbagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Adapun tugas masing-masing subbagian adalah sebagai berikut :

a. **Subbagian Perencanaan dan Evaluasi** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan evaluasi di lingkungan Badan.
b. **Subbagian Keuangan** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang keuangan di lingkungan Badan.

c. **Subbagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang umum dan kepegawaian di lingkungan badan.

Kepala Subbagian dalam melaksanakan tugas dibantu oleh pejabat pelaksana dan fungsional.

2.1.3.3 Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah merupakan unsur pelaksana penyusunan kebijakan di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris, yang bertugas melaksanakan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan bidang perencanaan dan pendanaan, data dan informasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pendanaan, data dan informasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
b. Pengoordinasian kebijakan teknis perencanaan dan pendanaan, data dan informasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
c. Pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan dan pendanaan, data dan informasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;

d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dibantu oleh pejabat pelaksana dan fungsional.

2.1.3.4 Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia;
b. Pengoordinasian kebijakan teknis perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia;
c. Pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia;
d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas Bidang Pemerintahan, dan Pembangunan Manusia

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemerintahan, dan Pembangunan Manusia dibantu oleh pejabat pelaksana dan fungsional.

2.1.3.5 Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan merupakan unsur pelaksana penyusunan kebijakan di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan

Kewilayahan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Badan dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris, yang bertugas melaksanakan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan.

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
b. Pengoordinasian kebijakan teknis perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
c. Pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dibantu oleh pejabat pelaksana dan fungsional.

2.1.3.6 Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Bidang Riset dan Inovasi Daerah merupakan unsur pelaksana penyusunan kebijakan di bidang Riset dan Inovasi Daerah, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris yang bertugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Penelitian,

Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah.

Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

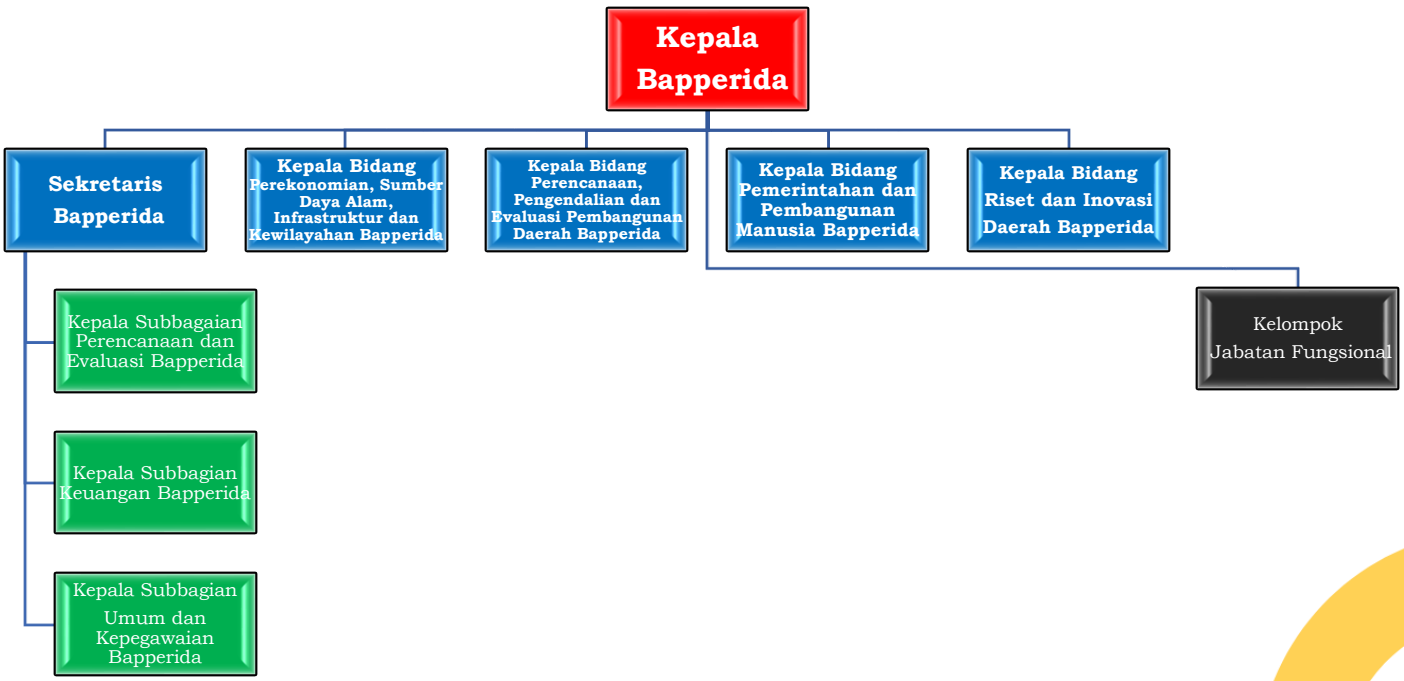
a. Perumusan kebijakan teknis Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di Daerah;
b. Pengoordinasian dan sinkronisasi kebijakan teknis di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di Daerah;
c. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di Daerah;
d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas Bidang Riset dan Inovasi Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dibantu oleh pejabat pelaksana dan fungsional.

2.1.3.7 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional. Pejabat Fungsional dalam pelaksanaan tugas dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau ketrampilan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bapperida Kota Tegal



Sumber Data : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan inovasi Daerah, 2025

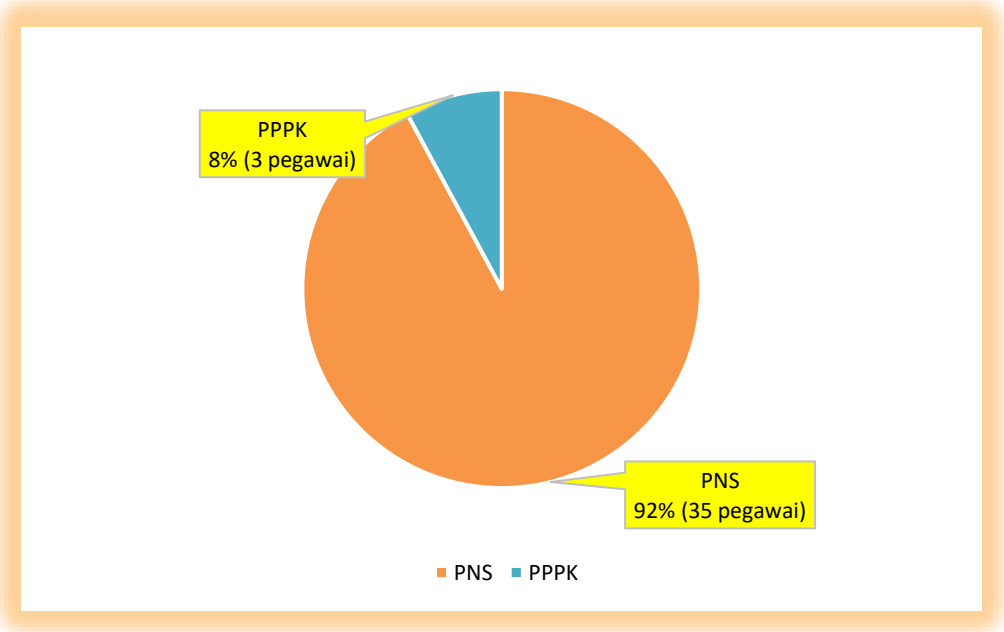
2.2 Sumber Daya Bapperida Kota Tegal

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Jumlah Pegawai Bapperida Kota Tegal sampai dengan 1 September 2025 tercatat sebanyak 38 (tiga puluh delapan) Pegawai dengan rincian sebagai berikut :

Gambar 2.2

Komposisi Pegawai

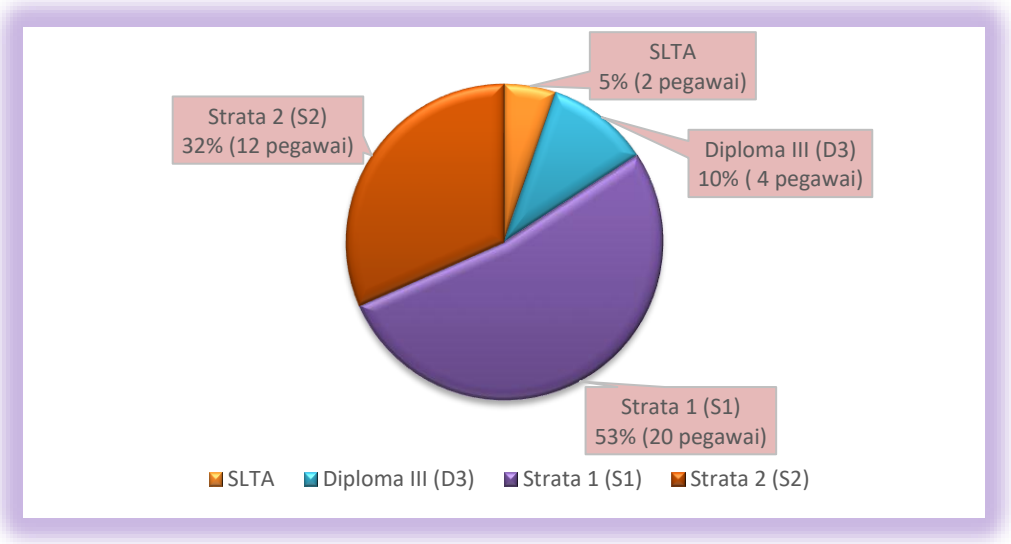


Sumber Data : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, 2025

a. Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

Gambar 2.3

Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

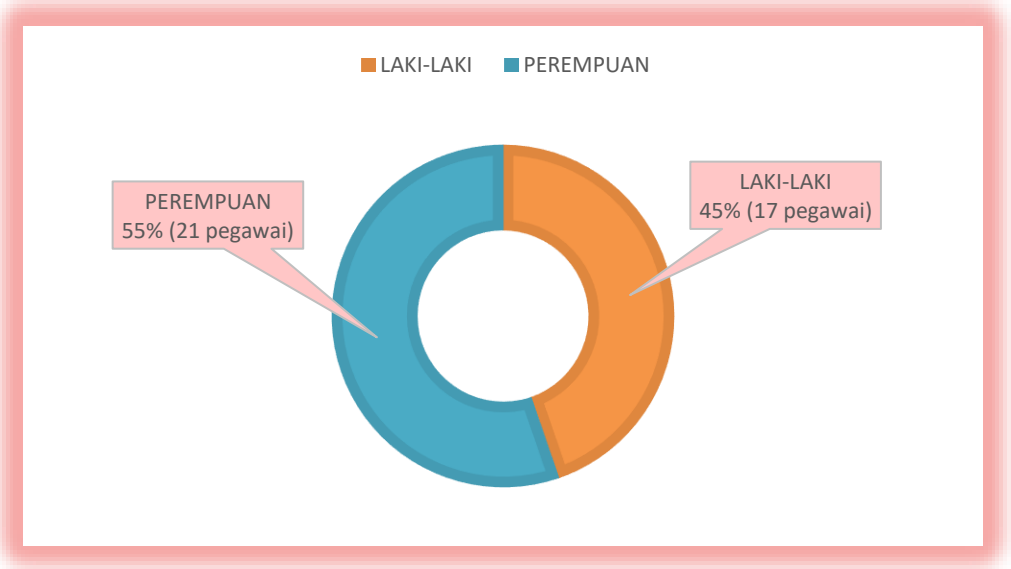


Sumber Data : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan inovasi Daerah, 2025

b. Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

Gambar 2.4

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

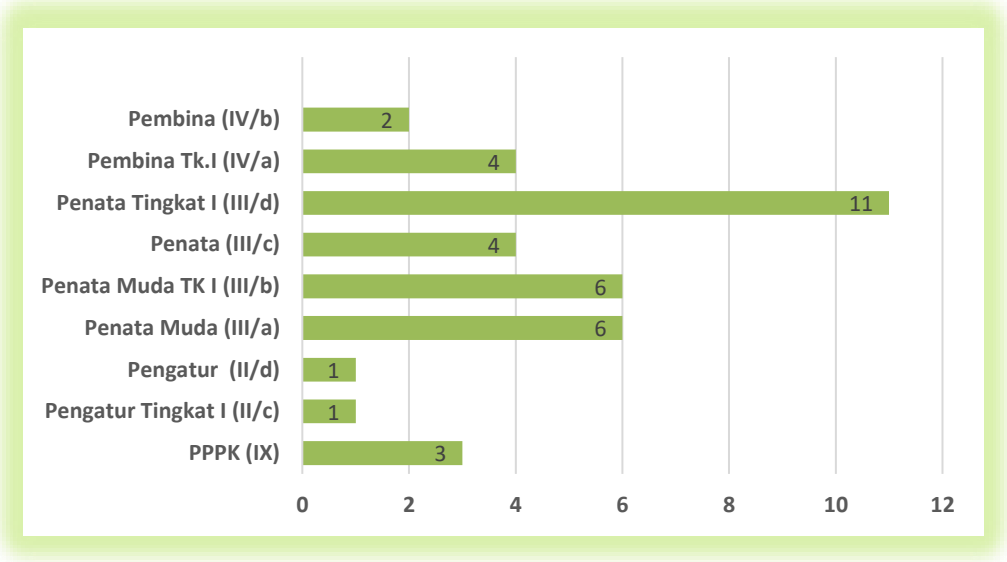


Sumber Data : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan inovasi Daerah, 2025

c. Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang

Gambar 2.5

Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang



Sumber Data : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan inovasi Daerah, 2025

2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana

Jenis sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi antara lain ruang kerja, peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi.

Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Bapperida Kota Tegal dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1

Sarana Prasarana Pendukung

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1	Mobil / Station Wagon	4
2	Sepeda Motor	14
3	Sepeda	2
4	Global Positioning System	1
5	Mesin Ketik Manual Portable	1
6	Mesin Fotocopy Double Folio	2
7	Lemari Kayu	6
8	Filing Cabinet Besi	12
9	White Board	1
10	Alat Penghancur Kertas	3
11	Mesin Absensi	1
12	LCD Projector/Infocus	2
13	Alat Kantor Lainnya	3
14	Meja Kerja Kayu	19
15	Meja Rapat	12
16	Meja 1/2 Biro	6
17	Kursi Rapat	123
18	Kursi Tamu	4
19	Meja Komputer	3
20	Meubeleur	3
21	Lemari Es	1
22	A.C. Split	20
23	Televisi	5
24	Loudspeaker	1
25	Sound System	2
26	Unit Power Supply	8
27	Camera Video	1
28	Bracket Standing Peralatan	2
29	Alat Rumah Tangga Lain-lain	4
30	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3
31	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	6
32	Meja Tamu Biasa	2
33	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1
34	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
35	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	10
36	Kursi Kerja Pejabat lainnya	15
37	Kursi Rapat Pejabat Eselon III	3
38	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	17
39	Buffet Kaca	5
40	peralatan studio audio lainnya (dst)	1
41	Tripod Camera	2
42	Camera Digital	2
43	LCD Monitor	1
44	Telephone (PABX)	1
45	Telephone Mobile	1
46	Facsimile	1
47	Hand Compression Falker	1
48	Mainframe (Komputer Jaringan)	2
49	P.C Unit	34
50	Lap Top	17
51	Monitor	2
52	Printer	25
53	Scanner	3
54	External/ Portable Hardisk	7

Sumber Data : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan inovasi Daerah, 2025

2.3 Kinerja Pelayanan Bapperida Kota Tegal

Perencanaan merupakan tahap awal dalam proses pembangunan daerah. Perencanaan merupakan proses bagaimana menetukan langkah masa depan dengan mempertimbangkan prioritas, potensi dan sumber daya yang dimiliki. Kualitas perencanaan menjadi hal yang penting dalam mengawal prioritas dengan potensi dan ketersediaan sumber daya ditengah dinamika lingkungan dan kondisi yang semakin dinamis. Dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2004, perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3)

pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 yang dimaksud dengan Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara publik. Dalam hal ini tingkat keberhasilan kinerja pelayanan dapat dilihat dari capaian kinerjanya, berdasarkan sasaran target Renstra periode sebelumnya.

Bapperida Kota Tegal merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki fungsi organisasi yang bersifat *techno structure*, oleh karena itu berperan penting dalam menghasilkan acuan berupa dokumen perencanaan baik jangka panjang, menengah dan tahunan yang akuntabel dan akan dipakai sebagai acuan dari perangkat daerah lain yang ada. Selaras dengan tugas dan fungsi, Bapperida mempunyai focus kinerja pelayanan urusan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan sebagai berikut yaitu:

Tabel 2.2
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Bapperida Kota Tegal
Tahun 2020 – 2024

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2020		2021		2022		2023		2024	
		TARGET (%)	REALISASI (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen penganggaran daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Konsistensi program RKPD dengan RPJMD	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Tingkat implementasi dokumen kelitbangan	60	100	65	65,08	65	65,22	70,31	70,31	70,31	76,92

Sumber Data : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan inovasi Daerah, 2025

Bapperida Kota Tegal pada Tahun 2020 s/d 2024 memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yang menjadi tolak ukur tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Adapun capaian 3 (tiga) indikator tersebut dari tahun 2020 s/d 2024 selalu mencapai target yang telah ditetapkan,

bahkan untuk indikator “Tingkat Implementasi Dokumen Kelitbangan” tingkat capaiannya melebihi 100%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Bapperida Kota Tegal telah dilaksanakan secara optimal.

Tabel 2.3

Data Hasil Riset Pemerintah Kota Tegal

Tahun 2020 – 2024

TAHUN	JUMLAH RISET YANG DILAKUKAN	JUMLAH RISET YANG DIIMPLEMENTASIKAN	PERBANDINGAN JUMLAH RISET YANG DILAKUKAN DENGAN RISET YANG DIIMPLEMENTASIKAN (%)
1	2	3	4=3:2
2020	NA	NA	NA
2021	NA	NA	NA
2022	116	35	30,17
2023	64	20	31,25
2024	42	15	35,71

Sumber Data : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan inovasi Daerah, 2025

Hasil Riset Kota Tegal pada Tahun 2022 s/d 2024 menunjukkan tren yang meningkat dalam implementasi riset yang telah dilakukan. Hal ini menunjukan bahwa riset yang telah dilakukan telah di implementasikan untuk pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kota Tegal.

Tabel 2.4

Data Inovasi Pemerintah Kota Tegal

Tahun 2020 – 2024

TAHUN	JUMLAH INOVASI YANG DILAPORKAN	JUMLAH PERANGKAT DAERAH YANG MELAKUKAN INOVASI	JUMLAH PERANGKAT DAERAH	PERBANDINGAN JUMLAH PD YANG MELAKUKAN INOVASI DENGAN TOTAL PD (%)
1	2	3	4	5=3:4
2020	NA	NA	NA	NA
2021	24	9	30	30,00
2022	21	15	30	50,00
2023	32	16	30	53,33
2024	60	26	30	86,67

Sumber Data : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan inovasi Daerah, 2025

Data Inovasi Kota Tegal pada Tahun 2021 s/d 2024 menunjukkan tren yang meningkat dalam penciptaan inovasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kota Tegal, dengan angka tertinggi pada

tahun 2024 sejumlah 26 (dua puluh enam) Perangkat Daerah yang telah melakukan inovasi Selain itu jumlah inovasi yang dilaporkan dari tahun 2021 s/d 2024 mengalami peningkatan, dengan angka tertinggi pada tahun 2024 sejumlah 60 (enam puluh) inovasi Perangkat Daerah.

Tabel 2.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan

Bappeda Kota Tegal

Tahun 2020

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	PERBANDINGAN REALISASI DENGAN TARGET (%)
1	2	3	4	5=4:3
1	Tingkat Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan dengan Dokumen Penganggaran Daerah	100	100	100
2	Tingkat konsistensi program RKPD dengan RPJMD	100	100	100
3	Tingkat kesesuaian program dokumen Renja dengan RKPD	100	100	100
4	Persentase capaian target program RPJMD	75	100	133,33
5	Persentase pemenuhan data/informasi dokumen perencanaan	87	100	114, 94
6	Persentase konsistensi rencana antar dokumen perencanaan daerah dan dokumen rencana perangkat daerah lingkup bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100	100	100
7	Persentase konsistensi rencana antar dokumen perencanaan daerah dan dokumen rencana perangkat daerah lingkup bidang ekonomi dan SDA	100	100	100

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	PERBANDINGAN REALISASI DENGAN TARGET (%)
1	2	3	4	5=4:3
8	Persentase konsistensi rencana antar dokumen perencanaan daerah dan dokumen rencana perangkat daerah lingkup bidang sosial budaya	100	100	100
9	Persentase inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	45,71	51,35	112,33

Sumber Data : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan inovasi Daerah, 2025

Bappeda Kota Tegal pada Tahun 2020 memiliki 9 (sembilan) Indikator Kinerja Pelayanan yang menjadi tolak ukur tingkat keberhasilan Perangkat Daerah. Adapun dari 9 (sembilan) indikator tersebut, seluruhnya mencapai target yang telah ditetapkan, bahkan untuk indikator “Persentase capaian target program RPJMD, Persentase pemenuhan data/informasi dokumen perencanaan dan Persentase inovasi yang dikembangkan dan ditetapkan” tingkat capaiannya melebihi 100%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kota Tegal telah dilaksanakan secara optimal.

Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Pelayanan

Bappeda Kota Tegal

Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	PERBANDINGAN REALISASI DENGAN TARGET (%)
1	2	3	4	5=4:3
1	Tingkat Konsistensi Program Dokumen Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100	100	100
2	Persentase Pelaporan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan	100	100	100
3	Persentase Pemenuhan Data/ Informasi Dokumen Perencanaan	100	100	100
4	Tingkat Konsistensi Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	100	100
5	Tingkat Konsistensi Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100	100	100
6	Tingkat Konsistensi Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	100	100
7	Persentase Inovasi yang Dikembangkan dan Diterapkan	30,00	32,56	108,53

Sumber Data : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan inovasi Daerah, 2025

Bappeda Kota Tegal pada Tahun 2021 memiliki 7 (tujuh) Indikator Kinerja Pelayanan yang menjadi tolak ukur tingkat keberhasilan Perangkat Daerah. Adapun dari 7 (tujuh) indikator tersebut,

seluruhnya mencapai target yang telah ditetapkan, bahkan untuk indikator “Persentase Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan” tingkat capaiannya melebihi 100%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kota Tegal telah dilaksanakan secara optimal.

Tabel 2.7

Pencapaian Kinerja Pelayanan

Bapperida Kota Tegal

Tahun 2022 - 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	2022			2023			2024		
		TARGET (%)	REALISASI (%)	PERBANDINGAN REALISASI DENGAN TARGET (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)	PERBANDINGAN REALISASI DENGAN TARGET (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)	PERBANDINGAN REALISASI DENGAN TARGET (%)
1	2	3	4	5=4:3	6	7	8=7:6	9	10	11=10:9
1	Tingkat Konsistensi Program Dokumen Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Pelaporan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Pemenuhan Data/ Informasi Dokumen Perencanaan	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Tingkat Konsistensi Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Tingkat Konsistensi Dokumen Perencanaan Bidang	100	100	100	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR KINERJA	2022			2023			2024		
		TARGET (%)	REALISASI (%)	PERBANDINGAN REALISASI DENGAN TARGET (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)	PERBANDINGAN REALISASI DENGAN TARGET (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)	PERBANDINGAN REALISASI DENGAN TARGET (%)
1	2	3	4	5=4:3	6	7	8=7:6	9	10	11=10:9
	Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)									
6	Tingkat Konsistensi Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	30	30,65	117,12	30	32,26	107,53	30	34,68	115,5
8	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	30	30,17	102,17	30	31,25	104,17	30	33,33	111,1
9	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	10	13,19	131,90	10	16,48	164,80	10	30,77	307,7
10	Persentase Kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	15	19,05	127,06	15	21,88	145,87	15	49,35	329,1
11	Persentase Inovasi yang Dikembangkan dan Diterapkan	30	35,14	117,13	30	35,90	119,67	30	36,36	121,2

Sumber Data : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan inovasi Daerah, 2025

Bapperida Kota Tegal pada Tahun 2022 s/d 2024 memiliki 11 (sebelas) Indikator Kinerja Pelayanan yang menjadi tolak ukur tingkat keberhasilan Perangkat Daerah. Adapun dari 11 (sebelas) indikator tersebut dari tahun 2022 s/d 2024 selalu mencapai target yang telah ditetapkan, bahkan untuk indikator “persentase implementasi rencana kelitbangan, persentase pemanfaatan hasil kelitbangan, persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah, persentase kebijakan

inovasi yang diterapkan di daerah dan persentase inovasi yang dikembangkan dan diterapkan ” tingkat capaiannya melebihi 100% pada Tahun 2022 s/d Tahun 2024. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Bapperida Kota Tegal telah dilaksanakan secara optimal.

Tabel 2.8

Pencapaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Bapperida Kota Tegal

Tahun 2020 - 2024

2020		2021		2022		2024	
NILAI	**KATEGORI**	**NILAI**	**KATEGORI**	**NILAI**	**KATEGORI**	**NILAI**	**KATEGORI**
70,80	Sangat Baik (BB)	71,21	Sangat Baik (BB)	67,60	Baik (B)	69,10	Baik (B)

Sumber Data : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan inovasi Daerah, 2025

Bapperida Kota Tegal pada Tahun 2020 s/d 2024 mendapatkan Nilai AKIP yang fluktuatif. Nilai AKIP pada tahun 2024 sebesar 69,10 (kategori Baik) atau mengalami peningkatan sebesar 1,60 dibanding Tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi AKIP di Bapperida Kota Tegal telah dilaksanakan secara optimal dalam rangka mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang baik *(Good Corporate Governance).* Pada tahun 2023, penilaian AKIP dijadikan satu dengan penilaian AKIP pada tahun 2024 dikarenakan menyesuaikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel 2.9

Pencapaian Manajemen Risiko Indeks (MRI)

Kota Tegal

Tahun 2020 - 2024

2022		2023		2024	
NILAI	**KATEGORI**	**NILAI**	**KATEGORI**	**NILAI**	**KATEGORI**
2,922	Level 2	2,959	Level 2	2,966	Level 2

Sumber Data : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan inovasi Daerah, 2025

Pemerintah Kota Tegal pada Tahun 2022 s/d 2024 mendapatkan Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) yang selalu meningkat. Nilai MRI pada tahun 2024 sebesar 2,966 (Level 2) atau naik 0,007 dibanding Tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Manajemen Risiko di Pemerintah Kota Tegal telah dilaksanakan dengan baik dalam rangka mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengelola risiko yang akan terjadi serta mengambil tindakan yang tepat untuk meminimalkan dampaknya.

Tabel 2.10

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Bappeda Kota Tegal

Tahun 2020

NO	PROGRAM	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	CAPAIAN
1	2	3	4	5=4:3
1	Program Perencanaan, Pembangunan Daerah	504.388.000	445.854.500	88,40
2	Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan	594.764.000	538.685.400	90,57
3	Program Pengembangan Data dan Informasi	133.744.000	98.789.000	73,86
4	Program Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	233.069.000	228.364.000	97,98
5	Program Perencanaan, Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	253.283.000	237.616.400	93,81
6	Program Perencanaan Pembangunan Masyarakat dan Sosial Budaya	385.675.000	300.104.100	77,81
7	Program Penelitian dan Pengkajian	137.072.000	111.255.000	81,17
8	Program Pengembangan dan Penerapan Inovasi Daerah	290.134.000	222.361.990	76,64
9	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.052.508.000	1.028.112.742	97,68

NO	PROGRAM	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	CAPAIAN
1	2	3	4	5=4:3
10	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	72.990.000	63.619.121	87,16
11	Program Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	19.996.000	17.892.200	89,48

Sumber Data : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan inovasi Daerah, 2025

Bappeda Kota Tegal pada Tahun 2020 memiliki 11 (sebelas) Program. Realisasi anggaran Bappeda Kota Tegal pada tahun 2020 rata – rata sebesar 86,34% dikarenakan pada tahun tersebut terdapat pandemi covid-19 sehingga pelaksanaan kegiatan secara langsung (FGD, Seminar, dll) dibatasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Walaupun dengan keterbatasan kondisi yang ada, Bappeda Kota Tegal telah melaksanakan seluruh kegiatan dengan optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi indikator Program diatas 100% dengan serapan anggaran dibawah 100%, hal ini menunjukkan efektivitas kinerja OPD tergolong sangat baik.

Tabel 2.11

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Bapperida Kota Tegal

Tahun 2021 – 2024

NO	Program	Anggaran				Realisasi				Capaian			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.355.976.700	1.299.294.100	2.151.903.001	857.589.963	1.113.189.996	1.220.982.880	2.013.402.550	811.691.450	82,10	93,97	93,56	94,65
2	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	888.788.500	956.022.050	959.942.913	1.212.616.600	685.425.250	889.576.500	826.087.080	1.196.102.580	77,12	93,05	86,06	88,64
3	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	344.966.000	380.998.100	383.623.300	372.286.500	294.268.055	354.192.944	371.619.310	361.290.650	85,30	92,96	96,87	87,05
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	5.869.861.367	5.775.189.245	6.137.420.195	8.643.914.031	5.625.999.763	5.432.507.041	5.895.949.759	5.916.185.638	95,85	94,07	96,07	85,20
	Jumlah	**8.459.592.567**	**8.411.503.495**	**9.632.889.409**	**8.643.914.031**	**7.718.883.064**	**7.897.259.365**	**9.107.058.699**	**8.285.270.318**	**91,24**	**93,89**	**94,54**	**95,85**

Sumber Data : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan inovasi Daerah, 2025

Bapperida Kota Tegal pada Tahun 2021 s/d Tahun 2024 memiliki 4 (empat) Program. Realisasi anggaran Bapperida Kota Tegal pada Tahun 2021 s/d Tahun 2024 rata – rata sebesar 93,73%. Walaupun realisasi anggaran tidak mencapai 100%, tetapi Bapperida Kota Tegal telah melaksanakan seluruh kegiatan dengan optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi indikator Program diatas 100% dengan serapan anggaran dibawah 100%, hal ini menunjukkan efektivitas kinerja OPD tergolong sangat baik.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan Bapperida Kota Tegal

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bapperida Kota Tegal mempunyai kelompok sasaran layanan antara lain :

1. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tegal
   Dilaksanakan dalam rangka penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
2. DPRD Kota Tegal
   Dilaksanakan dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
3. Masyarakat
   Dilaksanakan dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
4. Akademisi
   Dilaksanakan dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

2.5 Permasalahan Pelayanan Bapperida Kota Tegal

Permasalahan merupakan kesenjangan atau gap yang terjadi antara kinerja yang dicapai saat ini dengan rencana atau standar yang ada, serta apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang dengan kondisi riil yang terjadi saat ini. Gap yang terjadi dipengaruhi faktor penyebab, baik faktor yang mendorong keberhasilan maupun kegagalan, yang harus dilakukan analisis dalam rangka menyusun perencanaan selanjutnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bapperida Kota Tegal mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, riset dan inovasi daerah, yang dalam pelaksanaannya masih menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran Pembangunan Daerah;
2. Belum optimalnya pemanfaatan hasil riset sebagai Kebijakan Pembangunan;
3. Belum optimalnya pengelolaan risiko Perangkat Daerah.

2.6. Isu Strategis Bapperida Kota Tegal

Berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, perlu disusun identifikasi berbagai isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional dan regional) yang dapat mempengaruhi Perangkat Daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain RPJMN 2025-2029, Renstra K/L, laporan resmi dari Lembaga Pemerintah, Laporan KLHS RPJMD 2025 – 2029 dan hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah.

Isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah, untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan. Isu-isu strategis juga merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Perumusan Isu Strategis Bapperida Kota Tegal, dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.12

Isu Strategis Bapperida Kota Tegal

PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
		Global	Nasional	Regional	
1.Belum optimalnya keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran Pembangunan Daerah	-	-	-	Tata Kelola pemerintahan yang dinamis (RPJPD Prov.Jateng Thn 2025-2045)	Optimalisasi keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran Pembangunan Daerah
2.Belum optimalnya Pemanfaatan Hasil riset sebagai Kebijakan Pembangunan	-	-	-	Tata Kelola pemerintahan yang dinamis dan berintegritas (RPJMD Prov.Jateng Thn 2025-2029)	Optimalisasi pemanfaatan hasil riset sebagai kebijakan pembangunan
3.Belum optimalnya pengelolaan risiko Perangkat Daerah	-	-	-	Tata Kelola pemerintahan yang dinamis dan	Optimalisasi pengelolaan risiko

PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
		Global	Nasional	Regional	
				berintegritas (RPJMD Prov.Jateng Thn 2025-2029)	Perangkat Daerah.

Sumber Data : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan inovasi Daerah, 2025

Berdasarkan hasil analisis dan identifikasi terkait permasalahan Bapperida Kota Tegal dan isu lingkungan dinamis baik KLHS, Nasional maupun Regional, maka isu Strategis Bapperida Kota Tegal dirumuskan sebagai berikut :

1. Optimalisasi keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran Pembangunan Daerah;
2. Optimalisasi pemanfaatan hasil riset sebagai kebijakan Pembangunan;
3. Optimalisasi pengelolaan risiko Perangkat Daerah.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab II serta tugas dan fungsi Bapperida Kota Tegal, maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2025 – 2029 yang menjadi tugas Bapperida Kota Tegal dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Bapperida Kota Tegal Tahun 2025 – 2029

Perumusan tujuan dan sasaran pada Renstra Bapperida Kota Tegal Tahun 2025 - 2029 mendasarkan pada analisis terhadap isu strategis serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tegal Tahun 2025 - 2029.

Adapun Tujuan dan Sasaran Renstra Bapperida Kota Tegal sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra
Bapperida Kota Tegal
Tahun 2025 - 2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2025-2029	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FORMULASI	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan	Terwujudnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah		Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	$\frac{\text{Jumlah Program RKPD Tahun berkenaan}}{\text{Jumlah Program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan}} \times 100\%$	%	100	100	100	100	100	100	100
			Indeks Inovasi Daerah	Kementerian Dalam Negeri RI	Angka	54,62	55	56	57	58	59	60
		Terwujudnya Konsistensi antar Dokumen Perencanaan dan Dokumen Penganggaran Daerah	Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	$\frac{\text{Jumlah Program APBD Tahun berkenaan}}{\text{Jumlah Program RKPD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan}} \times 100\%$	%	100	100	100	100	100	100	100
		Terwujudnya Pemanfaatan Riset dan Inovasi Daerah dalam Pembangunan	Kapabilitas Inovasi	Penilaian dari Badan Riset Inovasi Negara (BRIN)	Angka	2,66	2,76	2,86	2,96	3,11	3,25	3,28
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	69,10	78,80	78,90	79,00	79,10	79,20	79,30
		Terwujudnya Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Manajamen Risiko Indeks (MRI) Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Penilaian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	Angka	2,966	-	2,970	2,975	2,980	2,985	2,999

Sumber Data : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan inovasi Daerah, 2025

Bapperida Kota Tegal pada periode Renstra Tahun 2025 – 2029 memiliki **1 (satu) Tujuan dengan 2 (dua) indikator tujuan dan 4 (empat) Sasaran dengan 4 (empat) indikator sasaran**.

Indikator Manajemen Risiko Indeks (MRI) pada tahun 2025 masih dikoordinir oleh Inspektorat Kota Tegal, sedangkan mulai tahun 2026 - 2030 Indikator MRI dikoordinir oleh Bapperida Kota Tegal.

Target Tujuan dan Sasaran Bapperida Kota Tegal disusun sampai dengan tahun 2030, sesuai dengan ketentuan Inpres Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta sebagai upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah sebagai pijakan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah pada Tahun 2030.

3.2 Strategi Renstra Bapperida Kota Tegal

Strategi Renstra adalah adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah atau upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Strategi Renstra Bapperida Kota Tegal dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.2

Strategi Renstra

Bapperida Kota Tegal

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
1	2	3
Terwujudnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Terwujudnya Konsistensi antar Dokumen Perencanaan dan Dokumen Penganggaran Daerah	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Berbasis Kinerja
	Terwujudnya Pemanfaatan Riset dan Inovasi Daerah dalam Pembangunan	Mendorong Implementasi Riset dan Inovasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja
	Terwujudnya Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Meningkatkan Sistem Pengendalian intern Pemerintah Daerah

Sumber Data : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan inovasi Daerah, 2025

3.3 Arah Kebijakan Renstra Bapperida Kota Tegal

Arah kebijakan *(policy direction)* adalah pedoman atau panduan yang digunakan untuk mengarahkan perumusan strategi dan program dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Arah kebijakan berfungsi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan, memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan selaras dan berkesinambungan untuk mencapai tujuan jangka panjang.

Arah Kebijakan Renstra adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Arah Kebijakan Renstra Bapperida Kota Tegal dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.3

Arah Kebijakan Renstra

Bapperida Kota Tegal

NO	NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD KOTA TEGAL TAHUN 2025 - 2029	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA BAPPERIDA KOTA TEGAL TAHUN 2025 - 2029	KET
1	1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah; 4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.	Penguatan Pembangunan tata Kelola pemerintahan, sosial budaya, infrastruktur (penataan perkotaan), lingkungan hidup, sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi, kesetaraan gender dan toleransi beragama berbasis pada riset dan inovasi	Penguatan Kualitas Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	
2		Akselerasi (Percepatan) Pembangunan tata Kelola pemerintahan, sosial budaya, infrastruktur (penataan perkotaan), lingkungan hidup, sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi, kesetaraan gender dan toleransi beragama berbasis pada riset dan inovasi	Akselerasi (Percepatan) Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	
3		Akselerasi (Percepatan) Pembangunan tata Kelola pemerintahan, sosial budaya, infrastruktur (penataan perkotaan), lingkungan hidup, sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi, kesetaraan gender dan toleransi beragama berbasis pada riset dan inovasi	Akselerasi (Percepatan) Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	
4		Pemantapan Pembangunan tata Kelola pemerintahan, sosial budaya, infrastruktur (penataan perkotaan), lingkungan hidup, sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi, kesetaraan gender dan toleransi beragama berbasis pada riset dan inovasi	Pemantapan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	
5		Perwujudan tata Kelola pemerintahan, sosial budaya, infrastruktur (penataan perkotaan), lingkungan hidup, sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi, kesetaraan gender dan toleransi beragama berbasis pada riset dan inovasi	Perwujudan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang berkualitas	

Sumber Data : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan inovasi Daerah, 2025

3.4 Penahapan Renstra Bapperida Kota Tegal Tahun 2026 – 2030

Penahapan Renstra adalah pelaksanaan prioritas kegiatan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra Bapperida Kota Tegal dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.4

Penahapan Renstra

Bapperida Kota Tegal Tahun 2026 – 2030

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
1	2	3	4	5
Penguatan Kualitas Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Peningkatan Keselarasan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Peningkatan Keterhubungan Kinerja Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Peningkatan Kualitas, Keselarasan dan Keterhubungan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Perwujudan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang Berkelanjutan untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Sumber Data : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan inovasi Daerah, 2025

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Cascading Bapperida Kota Tegal

Cascading OPD (Organisasi Perangkat Daerah) adalah proses penjabaran atau turunan dari dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan secara bertingkat, dari level pemerintah daerah (RPJMD atau RKPD) ke level masing-masing OPD (Renstra dan Renja).

Tujuan dalam penyusunan Cascading yakni untuk menyelaraskan rencana kerja OPD dengan tujuan pembangunan daerah, mewujudkan kinerja yang terukur dan akuntabel dari tiap OPD serta memastikan sinergi antar-OPD dalam mendukung prioritas pembangunan.

Bapperida Kota Tegal pada periode Tahun 2025 - 2029 mendukung **Misi 1 Wali Kota Tegal** "Melanjutkan Pemerintahan Yang Bersih, Demokratis, Disiplin, Kompeten Adaptif Dan Inovatif" dengan **Tujuan** "Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih" serta **Sasaran** "Terselenggaranya Pemerintahan yang Bebas dari Korupsi".

Secara lengkap Cascading Bapperida dapat dirumuskan sebagai berikut :

Tabel 4.1

Cascading

Bapperida Kota Tegal

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTPUT/ OUTCAME	INDIKATOR	SATUAN	JENIS (POSITIF / NEGATIF)	DEFINISI OPERASIONAL	METADATA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terwujudnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah				Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	%	Positif	Konsistensi jumlah Program pada Dokumen RPJMD dengan Dokumen RKPD	Jumlah Program RKPD/ Jumlah Program RPJMD
				Indeks Inovasi Daerah	Angka	Positif	Indeks Inovasi Daerah adalah seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan periode tertentu sesuai Permendagri 104 tahun 2028	IID=Skor Total/Skor Total Maksimum x 100 Kategori IIID Sangat Inovatif : 65,01 - 100,00 Inovatif : 40,01 – 65,00 Kurang Inovatif : 0,01 - 40,00 Tidak Dapat Dinilai : 0

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTPUT/ OUTCAME	INDIKATOR	SATUAN	JENIS (POSITIF / NEGATIF)	DEFINISI OPERASIONAL	METADATA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Terwujudnya Konsistensi antar Dokumen Perencanaan dan Dokumen Penganggaran Daerah			**Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD**	**%**	**Positif**	**Konsistensi Jumlah Program pada Dokumen RKPD dengan Dokumen APBD**	**Jumlah Program APBD/ Jumlah Program RKPD**
	Terwujudnya Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah			**Manajamen Risiko Indeks (MRI) Perangkat Daerah**	**Angka**	**Positif**	**Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah suatu indeks yang mengukur kualitas penerapan manajemen risiko pada Pemerintah Daerah**	**Level Ad Hoc (0,00 - 1,99) Level 2 (2,00 - 2,99) Level 3 (3,00 - 3,99) Level 4 (4,00 - 5,00)**
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	%	Positif	Keselarasan jumlah Program pada Dokumen RPJMD dengan Dokumen RENSTRA Perangkat Daerah	Jumlah Program Renstra PD/ Jumlah Program RPJMD
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan	Persentase Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Terfasilitasi	%	Positif		

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTPUT/ OUTCAME	INDIKATOR	SATUAN	JENIS (POSITIF / NEGATIF)	DEFINISI OPERASIONAL	METADATA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Terlaksananya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Dokumen			
		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara			
		Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah	Berita Acara			
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara			
		Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Terlaksananya Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan			
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen			

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTPUT/ OUTCAME	INDIKATOR	SATUAN	JENIS (POSITIF / NEGATIF)	DEFINISI OPERASIONAL	METADATA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Data Perencanaan Daerah	Persentase Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Terfasilitasi	%	Positif		
		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Terinputnya Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen			
		Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku			
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Terfasilitasi	%	Positif		

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTPUT/ OUTCAME	INDIKATOR	SATUAN	JENIS (POSITIF / NEGATIF)	DEFINISI OPERASIONAL	METADATA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan			
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan			
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Infrastruktur, Kewilayahan, Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang PPM	%	Positif	Keselarasan jumlah Program pada Dokumen RKPD dengan Dokumen Renja Perangkat Daerah Bidang PPM	Jumlah Program Renja PD Bidang PPM/ Jumlah Program RKPD
				Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang PSIK	%	Positif	Keselarasan jumlah Program pada Dokumen RKPD dengan Dokumen Renja Perangkat Daerah Bidang PSIK	Jumlah Program Renja PD Bidang PSIK/ Jumlah Program RKPD

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTPUT/ OUTCAME	INDIKATOR	SATUAN	JENIS (POSITIF / NEGATIF)	DEFINISI OPERASIONAL	METADATA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Termanfaatkannya Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Terfasilitasi	100	Positif		
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tersusunnya Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen			
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan			
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Laporan			

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTPUT/ OUTCAME	INDIKATOR	SATUAN	JENIS (POSITIF / NEGATIF)	DEFINISI OPERASIONAL	METADATA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bidang Pemerintahan	Bidang Pemerintahan	Bidang Pemerintahan				
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan			
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen			
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan			

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTPUT/ OUTCAME	INDIKATOR	SATUAN	JENIS (POSITIF / NEGATIF)	DEFINISI OPERASIONAL	METADATA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan			
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan			
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Termanfaatkannya Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Terfasilitasi	%	Positif		
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya	Dokumen			

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTPUT/ OUTCAME	INDIKATOR	SATUAN	JENIS (POSITIF / NEGATIF)	DEFINISI OPERASIONAL	METADATA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	(RPJPD. RPJMD dan RKPD)				
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan			
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan			
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan			

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTPUT/ OUTCAME	INDIKATOR	SATUAN	JENIS (POSITIF / NEGATIF)	DEFINISI OPERASIONAL	METADATA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (JPD, JMD dan RKPD)	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen			
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam	Laporan			
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam	Laporan			
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Termanfaatkannya Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Terfasilitasi	%	Positif		

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTPUT/ OUTCAME	INDIKATOR	SATUAN	JENIS (POSITIF / NEGATIF)	DEFINISI OPERASIONAL	METADATA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen			
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan			
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan			

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTPUT/ OUTCAME	INDIKATOR	SATUAN	JENIS (POSITIF / NEGATIF)	DEFINISI OPERASIONAL	METADATA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan			
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilatahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen			
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilatahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan			
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Laporan			

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTPUT/ OUTCAME	INDIKATOR	SATUAN	JENIS (POSITIF / NEGATIF)	DEFINISI OPERASIONAL	METADATA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilatahan	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilatahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan			
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan			**Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**Nilai**	**Positif**	**Pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.(4 Komponen Penilaian)**	**AA (Nilai > 90 – 100) → Sangat Memuaskan A (Nilai > 80 – 90) → Memuaskan BB (Nilai > 70 – 80) → Sangat Baik B (Nilai > 60 – 70) → Baik CC (Nilai > 50 – 60) → Cukup Baik (Memadai) C (Nilai > 30 – 50) → Kurang D (Nilai > 0 – 30) → Sangat Kurang**

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTPUT/ OUTCAME	INDIKATOR	SATUAN	JENIS (POSITIF / NEGATIF)	DEFINISI OPERASIONAL	METADATA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Kab/Kota	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Pemerintah Daerah	Indeks Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Indeks	Positif	Penilaian terhadap tata laksana, budaya organisasi dan inovasi (11 Variabel Penilaian)	Tingkat Kematangan Sangat Rendah jika skor yang diperoleh antara 10-19. Tingkat Kematangan Rendah jika skor yang diperoleh antara 19.1-28. Tingkat Kematangan Sedang jika skor yang diperoleh antara 28,1-37. Tingkat Kematangan Tinggi jika skor yang diperoleh antara 37,1-46. Tingkat Kematangan Sangat Tinggi jika skor yang diperoleh 46,1-55.
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terfasilitasi	%	Positif		

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTPUT/ OUTCAME	INDIKATOR	SATUAN	JENIS (POSITIF / NEGATIF)	DEFINISI OPERASIONAL	METADATA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Positif		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Dokumen	Positif		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Positif		
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	Positif		
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	Positif		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	Positif		

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTPUT/ OUTCAME	INDIKATOR	SATUAN	JENIS (POSITIF / NEGATIF)	DEFINISI OPERASIONAL	METADATA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terfasilitasi	%	Positif		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	Positif		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Positif		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terfasilitasi	%	Positif		
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Positif		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Terfasilitasi	%	Positif		

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTPUT/ OUTCAME	INDIKATOR	SATUAN	JENIS (POSITIF / NEGATIF)	DEFINISI OPERASIONAL	METADATA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Positif		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Positif		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Positif		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Positif		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Positif		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Positif		

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTPUT/ OUTCAME	INDIKATOR	SATUAN	JENIS (POSITIF / NEGATIF)	DEFINISI OPERASIONAL	METADATA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Positif		
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	Positif		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terfasilitasi	%	Positif		
		Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Positif		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Paket	Positif		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	Positif		

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTPUT/ OUTCAME	INDIKATOR	SATUAN	JENIS (POSITIF / NEGATIF)	DEFINISI OPERASIONAL	METADATA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	Positif		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terfasilitasi	%	Positif		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Positif		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Positif		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terfasilitasi	%	Positif		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Unit	Positif		

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTPUT/ OUTCAME	INDIKATOR	SATUAN	JENIS (POSITIF / NEGATIF)	DEFINISI OPERASIONAL	METADATA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				
		Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Positif		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Positif		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Positif		
	Terwujudnya Pemanfaatan Inovasi Daerah dalam Pembangunan			**Kapabilitas Inovasi**	**Angka**	**Positif**	**Jumlah nilai dari indikator pembentuk Pilar 12 dari Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kapabilitas Inovasi;**	**Sesuai Perhitungan BRIN**

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTPUT/ OUTCAME	INDIKATOR	SATUAN	JENIS (POSITIF / NEGATIF)	DEFINISI OPERASIONAL	METADATA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Program Riset dan Inovasi Daerah	Meningkatan Kualitas Hasil Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Fasilitasi Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah	%	Positif	Perbandingan Jumlah kegiatan Fasilitasi Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah yang dilaksanakan dengan yang direncanakan	Jumlah kegiatan Fasilitasi Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah yang dilaksanakan dibanding Jumlah Total kegiatan Fasilitasi Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah yang direncanakan
				Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	%	Positif	Perbandingan Jumlah Inovasi PD yang dimanfaatkan dengan Jumlah Inovasi PD yang dihasilkan	Jumlah Inovasi PD yang dimanfaatkan dibanding dengan Jumlah Inovasi PD yang dihasilkan
		Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Tersusunnya Hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Persentase Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	%	Positif		

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTPUT/ OUTCAME	INDIKATOR	SATUAN	JENIS (POSITIF / NEGATIF)	DEFINISI OPERASIONAL	METADATA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan			
		Penyusunan Kebijakan Berbasis Hasil Riset	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Berbasis Hasil Riset	Jumlah Naskah Kebijakan Berbasis Hasil Riset	Naskah			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan			
		Bimbingan Teknis dan Supervisi di Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, Kerja Sama Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi di Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, Kerja Sama Pembangunan Ilmu Pengetahuan	Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi di Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, Kerja Sama Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta	Pelatihan			

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTPUT/ OUTCAME	INDIKATOR	SATUAN	JENIS (POSITIF / NEGATIF)	DEFINISI OPERASIONAL	METADATA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	dan Teknologi, serta Kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan				
		Koordinasi Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah	Terlaksananya Koordinasi Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah	Dokumen			
		Invensi dan Inovasi	Tersusunnya Hasil Invensi dan Inovasi	Persentase Invensi dan Inovasi	%	Positif		
		Fasilitasi dan Pembinaan untuk Promosi dan Kampanye Inovasi	Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan untuk Promosi dan Kampanye Inovasi	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Promosi dan Kampanye Inovasi	Laporan			
		Fasilitasi dan Pembinaan untuk Peningkatan Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual	Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan untuk Peningkatan Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Peningkatan Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual	Laporan			
		Koordinasi Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Penelitian,	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Penelitian,	Kegiatan			

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTPUT/ OUTCAME	INDIKATOR	SATUAN	JENIS (POSITIF / NEGATIF)	DEFINISI OPERASIONAL	METADATA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dihasilkan oleh Lembaga/Pusat/Organisasi Penelitian lainnya di Daerah	Berbasis Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dihasilkan oleh Lembaga/Pusat/Organisasi Penelitian lainnya di Daerah	Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dihasilkan oleh Lembaga/Pusat/Organisasi Penelitian lainnya di Daerah				
		Fasilitasi dan Pembinaan untuk Apresiasi Prestasi Inovasi	Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan untuk Apresiasi Prestasi Inovasi	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Apresiasi Prestasi Inovasi	Laporan			
		Pelaksanaan Pembangunan, Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan, Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah	Tersedianya Sistem Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah	Sistem Informasi			
		Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penyesuaian Kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penyesuaian Kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penyesuaian Kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Laporan			

Sumber Data : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan inovasi Daerah, 2025

4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Bapperida Kota Tegal Tahun 2025 - 2029

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Bapperida Kota Tegal.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Sedangkan sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas dari suatu kegiatan. Sementara itu yang dimaksud dengan kinerja penyelenggaraan adalah hasil kerja dari suatu penyelenggaraan atau kegiatan yang dapat diukur, baik itu dalam bentuk keluaran, hasil, manfaat, atau dampak. Secara umum, kinerja penyelenggaraan mengacu pada tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Bapperida Kota Tegal disusun sampai dengan tahun 2030, sesuai dengan ketentuan Inpres Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta sebagai upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah sebagai pijakan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah pada Tahun 2030.

Berdasarkan isu strategis Bapperida yang telah tertuang dalam bab-bab sebelumnya, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bapperida Kota Tegal Tahun 2025 - 2029 meliputi :

1. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
   - 1.1 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
   - 1.2 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

1.3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

2. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
   1.1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
   1.2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
   1.3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
3. Program Riset dan Inovasi Daerah
   1.1 Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan
   1.2 Invensi dan Inovasi
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
   1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Secara lengkap program, kegiatan, sub kegiatan dan penyelenggaraan bidang urusan Bapperida dapat dirumuskan melalui sebagai berikut :

Tabel 4.2

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

Bapperida Kota Tegal

Tahun 2025 - 2030

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTPUT/OUTCAME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Terwujudnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah				Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	%	100	100	8.100.754	100	8.735.231	100	8.816.549	100	9.024.101	100	9.642.873	100	9.476.341
				Indeks Inovasi Daerah	Angka	54,62	55		56		57		58		59		60	

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTPUT/OUTCAME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Terwujudnya Konsistensi antar Dokumen Perencanaan dan Dokumen Penganggaran Daerah			**Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD**	**%**	**100**	**100**	**1.583.078**	**100**	**1.463.947**	**100**	**1.555.665**	**100**	**1.673.366**	**100**	**2.198.762**	**100**	**1.929.664**
	Terwujudnya Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah			**Manajamen Risiko Indeks (MRI) Perangkat Daerah**	**Angka**	**2,966**	**-**	**-**	**2,970**		**2,975**		**2,980**		**2,985**		**2,990**	
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	%	100	100	694.772	100	495.000	100	523.000	100	546.500	100	969.000	100	587.500
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan	Persentase Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Terfasilitasi	%	100	100	531.590	100	320.000	100	347.000	100	370.000	100	787.000	100	395.000
		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Terlaksananya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Dokumen	1	2	70.194	1	15.000	1	20.00	1	25.000	2	200.000	1	30.000

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTPUT/OUTCAME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Pembangunan Daerah															
		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	1	2	33.705	1	18.000	1	20.000	1	20.000	2	40.000	1	25.000
		Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah	Berita Acara	1	1	15.845	1	17.000	1	20.000	1	25.000	2	35.000	1	25.000
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	2	2	91.956	1	55.000	1	60.000	1	60.000	2	100.000	1	60.000
		Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Terlaksananya Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	270	270	22.670	270	25.000	270	27.000	270	30.000	270	32.00	270	35.000
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	4	3	297.219	3	190.000	2	200.000	2	210.000	3	380.000	2	220.000

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTPUT/OUTCAME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Data Perencanaan Daerah	Persentase Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Terfasilitasi	%	100	100	66.065	100	72.500	100	73.500	100	74.000	100	79.500	100	90.000
		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Terinputnya Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	1	1	60.114	1	65.000	1	65.000	1	65.000	1	70.000	1	80.000
		Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	1	1	5.951	1	7.500	1	8.500	1	9.000	1	9.500	1	10.000
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan	%	100	100	97.116	100	102.500	100	102.500	100	102.500	100	102.500	100	102.500

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTPUT/OUTCAME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Daerah Terfasilitasi														
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	4	4	90.566	4	95.000	4	95.000	4	95.000	4	95.000	4	95.000
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	4	4	6.550	4	7.500	4	7.500	4	7.500	4	7.500	4	7.500
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Infrastruktur, Kewilayahan, Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang PPM	%	100	100	888.305	100	968.947	100	1.032.665	100	1.126.866	100	1.229.762	100	1.342.164
				Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang PSIK	%	100	100		100		100		100		100		100	

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTPUT/OUTCAME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Termanfaatkannya Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Terfasilitasi	100	100	100	478.831	100	526.714	100	579.385	100	637.324	100	701.057	100	771.162
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tersusunnya Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	2	36.652	3	40.317	2	44.348	2	48.783	2	53.662	2	59.028
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	2	1	19.314	1	21.245	2	23.369	2	25.706	2	28.277	2	31.105

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTPUT/OUTCAME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	3	1	26.464	2	29.110	1	32.021	1	35.223	1	38.745	1	42.620
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	2	2	168.000	2	184.800	2	203.280	2	223.608	2	245.969	2	270.566
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	1	20.332	2	22.365	2	24.601	2	27.061	2	29.768	2	32.744

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTPUT/OUTCAME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	2	1	19.756	1	21.732	2	23.905	2	26.296	2	28.925	2	31.818
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	3	1	24.914	1	27.405	1	30.146	1	33.160	1	36.476	1	40.124
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	6	2	163.397	7	179.737	2	197.711	2	217.482	2	239.230	2	263.153

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTPUT/OUTCAME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Termanfaatkannya Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Terfasilitasi	%	100	100	321.845	100	347.593	100	351.069	100	379.154	100	409.486	100	442.245
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	1	7.181	1	7.756	1	7.834	1	8.460	1	9.137	1	9.868
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	1	1	3.063	1	3.309	1	3.342	1	3.609	1	3.898	1	4.210

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTPUT/OUTCAME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	1	1	6.810	1	7.355	1	7.428	1	8.023	1	8.664	1	9.358
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	1	3	292.233	1	315.611	1	318.767	1	344.269	1	371.810	1	401.555
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (JPD, JMD dan RKPD)	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	1	3.806	1	4.111	1	4.152	1	4.484	1	4.843	1	5.231

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTPUT/OUTCAME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam	Laporan	1	1	3.063	1	3.309	1	3.342	1	3.609	1	3.898	1	4.210
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam	Laporan	1	1	5.685	1	6.140	1	6.201	1	6.697	1	7.233	1	7.812
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Termanfaatkannya Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Terfasilitasi	%	100	100	87.629	100	94.639	100	102.210	100	110.387	100	119.218	100	128.755

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTPUT/OUTCAME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	2	17.461	1	18.858	1	20.366	1	21.996	1	23.755	1	25.656
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	1	1	3.063	1	3.309	1	3.573	1	3.859	1	4.168	1	4.501
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	1	1	3.435	1	3.710	1	4.007	1	4.327	1	4.673	1	5.047

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTPUT/OUTCAME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	3	3	44.413	1	47.966	1	51.803	1	55.947	1	60.423	1	65.257
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilatahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	1	3.056	1	3.301	1	3.565	1	3.850	1	4.158	1	4.491
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilatahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	1	1	3.060	1	3.305	1	3.569	1	3.855	1	4.163	1	4.496

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTPUT/OUTCAME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilatahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	1	1	7.681	1	8.295	1	8.959	1	9.676	1	10.450	1	11.286
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilatahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	1	1	5.456	1	5.893	1	6.364	1	6.874	1	7.424	1	8.017
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan			**Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**Nilai**	**69,10**	**78,80**	**6.159.087**	**78,90**	**6.657.284**	**79**	**6.634.384**	**79,10**	**6.713.234**	**79,20**	**6.795.611**	**79,30**	**6.887.176**
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Kab/Kota	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Pemerintah Daerah	Indeks Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Indeks	39	39	6.159.087	40	6.657.284	40	6.634.384	41	6.713.234	41	6.795.611	42	6.887.176
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%	100	100	11.897	100	12.037	100	13.240	100	14.563	100	16.018	100	17.619

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTPUT/OUTCAME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Perangkat Daerah	Kinerja Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Terfasilitasi														
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	7.140	3	7.140	3	7.854	3	8.640	3	9.504	4	10.454
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Dokumen	1	1	700	1	770	1	847	1	931	1	1.024	1	1.127
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	875	1	875	1	962	1	1.058	1	1.164	1	1.280
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	700	1	770	1	847	1	931	1	1.024	1	1.127

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTPUT/OUTCAME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	875	1	875	1	962	1	1.058	1	1.164	1	1.280
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1	2	1.607	2	1.607	2	1.767	2	1.943	2	2.137	2	2.350
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terfasilitasi	%	100	100	5.078.545	100	5.428.545	100	5.428.545	100	5.428.545	100	5.428.545	100	5.428.545
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	34	34	5.023.645	36	5.373.645	36	5.373.645	36	5.373.645	36	5.373.645	36	5.373.645
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	54.900	12	54.900	12	54.900	12	54.900	12	54.900	12	54.900

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTPUT/OUTCAME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terfasilitasi	%	100	100	3.900	100	3.900	100	3.900	100	3.900	100	3.900	100	3.900
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	12	3.900	12	3.900	12	3.900	12	3.900	12	3.900	12	3.900
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Terfasilitasi	%	100	100	465.846	100	690.591	100	745.698	100	815.224	100	893.147	100	980.111
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	5	7.417	5	7.417	5	8.159	5	8.974	5	9.872	5	10.859
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	58	63	143.994	63	145.000.	65	150.000	65	165.000	65	181.500	65	199.650
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah	Paket	25	24	25.046	25	25.046	27	27.500	27	30.250	27	33.275	27	36.602

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTPUT/OUTCAME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Tangga yang Disediakan														
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1420	2000	25.320	2000	30.000	2000	30.000	2000	30.000	2000	30.000	2000	30.000
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	7	5	34.127	7	34.127	7	37.539	7	40.000	7	44.000	7	48.000
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	2	3.120	2	4.000	2	4.000	2	4.000	2	5.000	2	5.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	218.000	12	435.000	12	478.500	12	525.000	12	577.500	12	635.000
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	2	8.821	2	10.000	2	10.000	2	12.000	2	12.000	2	15.000

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTPUT/OUTCAME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terfasilitasi	%	100	100	358.791	100	240.000	100	200.000	100	200.000	100	200.000	100	200.000
		Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	2	2	32.056	2	50.000	2	50.000	2	50.000	2	50.000	2	50.000
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Paket	6	15	311.334	1	150.000	1	150.000	1	150.000	1	150.000	1	150.000
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	0	12	15.400	40	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	2	68.000	0	0	2	68.000		0

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTPUT/OUTCAME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terfasilitasi	%	100	100	43.900	100	48.000	100	48.000	100	53.000	100	53.000	100	53.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	3.000	12	3.000	12	3.000	12	3.000	12	3.000	12	3.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	40.900	12	45.000	12	45.000	12	50.000	12	50.000	12	50.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terfasilitasi	%	100	100	196.206	100	234.210	100	195.000	100	198.000	100	201.000	100	204.000
		Penyediaan Jasa	Terlaksananya Penyediaan	Jumlah Kendaraan	Unit	18	18	95.650	23	95.650	23	100.000	23	100.000	23	100.000	23	100.000

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTPUT/OUTCAME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya														
		Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	4	4	10.000	4	10.000	4	15.000	4	15.000	4	15.000	4	15.000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	22	39	28.560	39	28.560	39	30.000	45	33.000	45	36.000	45	39.000
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	61.996	1	100.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTPUT/OUTCAME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Terwujudnya Pemanfaatan Inovasi Daerah dalam Pembangunan			Kapabilitas Inovasi	Angka	2,66	2,76	358.588	2,86	614.000	2,96	626.500	3,11	637.500	3,25	648.500	3,28	659.500
		Program Riset dan Inovasi Daerah	Meningkatan Kualitas Hasil Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Fasilitasi Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah	%	-	-	-	100	614.000	100	626.500	100	637.500	100	648.50	100	659.500
				Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	%	-	-		100		100		100		100		100	

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTPUT/OUTCAME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Tersusunnya Hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Persentase Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	%	-	-	-	100	204.000	100	205.500	100	206.500	100	207.500	100	208.500
		Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan	-	-	-	1	7.000	1	7.000	1	7.000	1	7.000	1	7.000
		Penyusunan Kebijakan Berbasis Hasil Riset	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Berbasis Hasil Riset	Jumlah Naskah Kebijakan Berbasis Hasil Riset	Naskah	-	-	-	1	70.000	1	71.000	1	71.500	1	72.000	1	72.500
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan	-	-	-	1	7.000	1	7.500	1	8.000	1	8.500	1	9.000

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTPUT/OUTCAME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Bimbingan Teknis dan Supervisi di Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, Kerja Sama Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta Kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi di Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, Kerja Sama Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta Kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi di Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, Kerja Sama Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta Kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Pelatihan	-	-	-	1	70.000	1	70.000	1	70.000	1	70.000	1	70.000
		Koordinasi Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah	Terlaksananya Koordinasi Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah	Dokumen	-	-	-	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000
		Invensi dan Inovasi	Tersusunnya Hasil Invensi dan Inovasi	Persentase Invensi dan Inovasi	%	-	-	-		410.000		421.000		431.000		441.000		451.000
		Fasilitasi dan Pembinaan untuk Promosi	Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan	Jumlah Laporan Fasilitasi dan	Laporan	-	-	-	1	100.000	1	110.000	1	120.000	1	130.000	1	140.000

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTPUT/OUTCAME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		dan Kampanye Inovasi	untuk Promosi dan Kampanye Inovasi	Pembinaan untuk Promosi dan Kampanye Inovasi														
		Fasilitasi dan Pembinaan untuk Peningkatan Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual	Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan untuk Peningkatan Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Peningkatan Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual	Laporan	-	-	-	1	75.000	1	75.000	1	75.000	1	75.000	1	75.000
		Koordinasi Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dihasilkan oleh Lembaga/Pusat/Organisasi Penelitian lainnya di Daerah	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dihasilkan oleh Lembaga/Pusat/Organisasi Penelitian	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dihasilkan oleh Lembaga/Pusat/Organisasi Penelitian	Kegiatan	-	-	-	1	5.000	1	6.000	1	6.000	1	6.000	1	6.000

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTPUT/OUTCAME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			lainnya di Daerah	lainnya di Daerah														
		Fasilitasi dan Pembinaan untuk Apresiasi Prestasi Inovasi	Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan untuk Apresiasi Prestasi Inovasi	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Apresiasi Prestasi Inovasi	Laporan	-	-	-	1	150.000	1	150.000	1	150.000	1	150.000	1	150.000
		Pelaksanaan Pembangunan, Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan, Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah	Tersedianya Sistem Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah	Sistem Informasi	-	-	-	1	40.000	1	40.000	1	40.000	1	40.000	1	40.000
		Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penyesuaian Kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penyesuaian Kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penyesuaian Kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Laporan	-	-	-	2	40.000	2	40.000	2	40.000	2	40.000	2	40.000

Sumber Data : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan inovasi Daerah, 2025

4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapperida Kota Tegal Tahun 2025 - 2029

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah serta diperoleh dari indikator tujuan/ sasaran yang terseleksi.

Target IKU Bapperida Kota Tegal disusun sampai dengan tahun 2030, sesuai dengan ketentuan Inpres Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta sebagai upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah sebagai pijakan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah pada Tahun 2030.

Indikator Kinerja Utama Bapperida Kota Tegal Tahun 2025 - 2029, dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Bapperida Kota Tegal
Tahun 2025 - 2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	%	100	100	100	100	100	100	
2	Indeks Inovasi Daerah	Angka	55	56	57	58	59	60	
3	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	78.80	78,90	79	79,10	79,20	79,30	

Sumber Data : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan inovasi Daerah, 2025

BAB V

PENUTUP

Renstra Bapperida Kota Tegal Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang dijadikan sebagai acuan kinerja dan ukuran keberhasilan bagi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Renstra Bapperida Kota Tegal menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan yang mengacu pada RPJMD Kota Tegal Tahun 2025-2029 untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya serta perubahan lingkungan strategis yang kemungkinan akan timbul pada periode Renstra.

Renstra Bapperida juga akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) maupun Evaluasi Kinerja Bapperida. Demi menjamin keberhasilan pelaksanaan tujuan jangka menengah sebagaimana termuat dalam Renstra, Bapperida perlu melakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi capaian terhadap target setiap tahunnya. Keberhasilan pelaksanaan Renstra Bapperida ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, sumber pendanaan, serta komitmen semua unsur terkait.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Dokumen Renstra ini disampaikan ucapan terima kasih atas kerja samanya, kami berharap Rencana Strategis Bapperida Kota Tegal Tahun 2025-2029 dapat direalisasikan dengan optimal.

Tegal, 9 September 2025

Plt.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah Kota Tegal

SARTONO EKO SAPUTRO, S.STP
Pembina Utama Muda
NIP. 19760510 199602 1 003

BAPPERIDA
KOTA TEGAL